

BAB IV

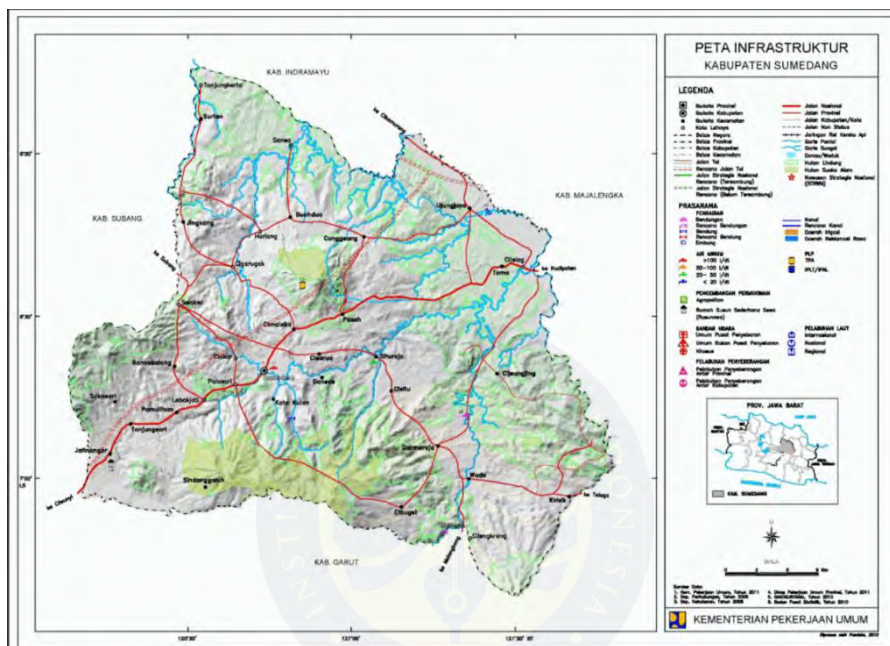
LIMINALITAS YANG MEMENGARUHI TERBENTUKNYA PRAKTIK RITUAL LARUNG JATIGEDE

4.1 Gambaran Umum Jatigede

Penelitian ini dilakukan di kawasan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat berlangsungnya ritual Larung yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pada Agustus tahun lalu, peneliti berkesempatan untuk menyaksikan langsung pelaksanaan ritual tersebut. Kehadiran langsung ini memberikan gambaran nyata tentang suasana sakral dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, peneliti juga beberapa kali mengunjungi tempat Pak Sihabudin, yang merupakan Ketua Lembaga Adat setempat. Di sana terdapat sebuah saung sederhana yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi, termasuk untuk wawancara dengan tokoh-tokoh adat. Tempat ini menjadi titik penting dalam proses pengumpulan data karena dari sinilah peneliti bisa mendapatkan banyak informasi langsung dari pelaku dan pengurus adat. Beberapa informan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini di antaranya adalah Pak Sihabudin sendiri sebagai Ketua Lembaga Adat yang memegang peran penting dalam pelaksanaan ritual, kemudian kuncen atau juru kunci yang memahami aspek spiritual dari tradisi ini, serta Budi Sobar selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang yang menjelaskan posisi ritual Larung dalam konteks pelestarian budaya. Selain itu, ada juga Kases Mekar Asih yang turut aktif dalam kegiatan budaya lokal dan memahami dinamika sosial yang terjadi di

masyarakat. Semua informan ini memberikan sudut pandang yang beragam dan memperkaya pemahaman peneliti terhadap makna dan peran ritual Larung di tengah kehidupan masyarakat Jatigede.

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Sumedang



(Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum)

Berbicara tentang pembangunan waduk Jatigede rasanya akan kurang lengkap bila kita tidak membahas atau menyinggung latar belakang tentang sejarah Kerajaan Sumedang Larang yang pernah berkuasa di daerah ini. Memahami sejarah tidak hanya memberikan gambaran tentang masa lalu, tetapi juga menjadi kunci untuk menelaah kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat yang saat ini mendiami wilayah pembangunan waduk.

Kerajaan Sumedang Larang sendiri diperkirakan berdiri sejak abad ke-15 di wilayah Jawa Barat, dan menurut beberapa catatan sejarah, kerajaan ini cukup dikenal, sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar lain seperti Demak, Mataram,

Banten, dan Cirebon. Keberadaan Kerajaan Sumedang Larang menjadi bukti penting atas penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, sebagaimana dilakukan juga oleh Cirebon dan Banten. Wilayah Sumedang yang kini menjadi bagian administratif Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu peninggalan dari sejumlah kerajaan Sunda yang pernah berdiri di kawasan ini. Selain Sumedang Larang, sejarah mencatat keberadaan Kerajaan Pajajaran, yang juga berkaitan erat dengan Kerajaan Sunda-Galuh. Setelah runtuhnya Pajajaran akibat serangan aliansi kerajaan Cirebon, Banten, dan Demak, Sumedang Larang dianggap sebagai penerusnya, dan menjadi kerajaan yang memiliki otonomi dalam menentukan arah pemerintahannya sendiri. Sejarah panjang tersebut menunjukkan bahwa Sumedang bukan hanya penting dalam konteks lokal, melainkan juga dalam sejarah terbentuknya tatanan pemerintahan di Jawa Barat. Bahkan, kontribusi wilayah ini dalam pembangunan, seperti proyek strategis Waduk Jatigede, berdampak besar tidak hanya bagi masyarakat Sumedang, tetapi juga bagi wilayah lain di Jawa, terutama kawasan pantai utara (Pantura).

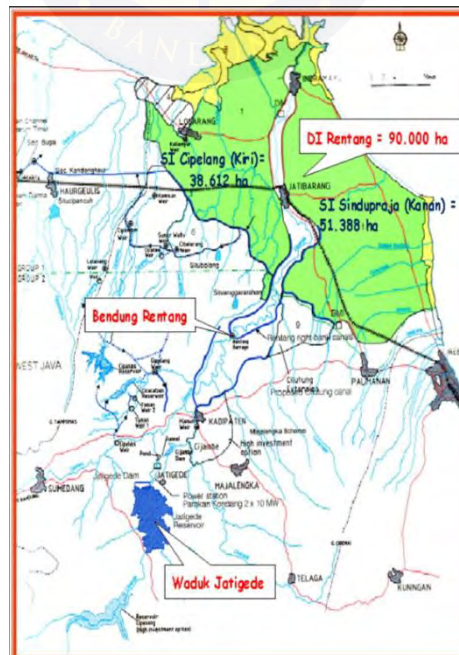
Gambar 4. 2 Gerbang Waduk Jatigede



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Rencana pembangunan Waduk Jatigede telah dimunculkan sejak tahun 1963 oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari megaprojek nasional. Proyek ini dirancang untuk memanfaatkan aliran Sungai Cimanuk-Cisanggarung dan mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat seperti Garut, Sumedang, Cirebon, Indramayu, dan Kuningan, serta Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah, dengan total cakupan area mencapai kurang lebih 7.711 kilometer persegi. Luas genangan dari Waduk Jatigede sendiri diperkirakan sekitar 4.891,13 hektare, mencakup lima kecamatan dan 26 desa. Pusat bendungan ini berada di Kampung Jatigede, Desa Cigeunjing, Kecamatan Jatigede, yang menjadi dasar penamaan bendungan tersebut sebagai Waduk Jatigede.

Gambar 4.3 Peta Daerah Genangan Waduk Jatigede



(Sumber: Tarungnews.com)

Pembangunan Waduk Jatigede pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi padi di lahan seluas 90.000 hektar dengan mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi yang telah tersedia, yaitu sistem irigasi Rentang. Selain itu, proyek ini juga dirancang untuk menyuplai kebutuhan air bersih di beberapa wilayah seperti Kabupaten Sumedang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Balongan dengan kapasitas distribusi mencapai 3.500 liter per detik. Tidak hanya itu, pembangunan ini juga mencakup penyediaan energi melalui PLTA Parakan Kondang berdaya 7,5 megawatt dan PLTA Jatigede dengan kapasitas 110 megawatt. Untuk mewujudkan proyek ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,035 triliun. Rinciannya, sebesar Rp2,040 triliun digunakan untuk pembangunan waduk, Rp1,530 triliun untuk pembangunan PLTA Jatigede, dan Rp465 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang memicu konflik, baik antarwarga maupun antara masyarakat dan pemerintah.

Gambar 4. 4 Tampak luar Bendungan Waduk Jatigede



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dalam proses pembangunan Waduk Jatigede, muncul berbagai konflik yang dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yakni konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi karena ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar-pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Suwartapradja (2005) pemerintah daerah sempat menyatakan penghentian pembangunan akibat ketidaktegasan pemerintah pusat. Sementara itu, pihak proyek tetap melanjutkan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 97 Tahun 1984/431/KPTS/1984 tanggal 5 November 1984 yang belum dicabut saat itu.

Konflik antar-pemerintah daerah muncul karena adanya kepentingan masing-masing wilayah dalam memperoleh keuntungan dari proyek tersebut, tanpa mengedepankan manfaat bersama yang dapat diperoleh dari keberadaan waduk ini. Sementara itu, di tengah masyarakat Jatigede sendiri, timbul perpecahan pandangan terkait proyek pembangunan waduk. Menurut Suwartapradja (2005), masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menyetujui pembangunan dengan harapan memperoleh kompensasi serta tetap dapat menggarap lahan sampai proses penggenangan. Kedua, kelompok yang menolak karena nilai ganti rugi dianggap rendah, data harta tidak tercatat secara menyeluruh, dan lokasi relokasi yang belum jelas. Ketiga, kelompok yang bersikap pasif dan tidak menunjukkan sikap jelas terhadap proyek ini. Permasalahan ini mulai mencuat sejak tahap awal pembebasan lahan pada tahun 1982, yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.1266.Um/81 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Tahapan dimulai dari pendataan langsung, namun

muncul ketidaksesuaian antara data di lapangan dan dokumen resmi seperti kikitir atau ha/a ngko (bukti kepemilikan tanah). Proses berikutnya adalah musyawarah penentuan nilai ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia 9 yang terdiri dari berbagai unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak warga merasa tidak puas. Beberapa penyebabnya antara lain tekanan dari aparat, pencatatan harta yang tidak lengkap, serta kompensasi yang dianggap terlalu rendah. Menurut Sutisna (2011), tahapan pendataan lahan dipenuhi praktik manipulasi dan diskriminatif, bahkan warga yang menolak pembebasan lahan sempat diberi stigma sebagai pembangkang atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah pendataan, dilanjutkan dengan pemberian ganti rugi yang besarnya sudah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T), berkisar antara Rp350–660 per meter persegi, atau Rp5.000–8.500 per tumbak. Padahal, harga pasar saat itu jauh lebih tinggi, yaitu Rp30.000–60.000 per tumbak. Akibatnya, banyak warga dari beberapa desa seperti Jemah, Sukakersa, Ciranggem, dan Mekarasih di Kecamatan Jatigede; Padajaya dan Cisurat di Kecamatan Wado; serta sejumlah desa di Kecamatan Darmaraja dan Cisit, merasa dirugikan dan hanya bisa pasrah agar tetap mendapatkan kompensasi. Gelombang kedua pembebasan lahan berlangsung antara tahun 1994–1998, meliputi desa-desa di Kecamatan Darmaraja dan Jatinunggal. Total penerima ganti rugi sejak tahun 1982 mencapai sekitar 4.240 kepala keluarga, atau sekitar 74,6% dari total 5.686 KK atau 28.430 jiwa yang terdampak proyek pembangunan (PPSDAL, 2000). Dalam proses selanjutnya, dasar hukum yang digunakan berubah menjadi Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang lebih menekankan musyawarah dengan acuan Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP), sehingga nilai ganti rugi cenderung lebih tinggi. Tahap terakhir pembebasan lahan dilakukan mulai tahun 2004 hingga sekarang, mencakup desa-desa seperti Cibogo dan Sukaratu di Kecamatan Darmaraja, Wado di Kecamatan Wado, serta Pawenang di Kecamatan Jatinunggal. Dasar hukum yang digunakan kali ini adalah Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci tentang bentuk ganti rugi dan komponen penilaiannya. Selain pembebasan lahan, pemerintah juga memfasilitasi relokasi warga melalui program transmigrasi lokal di wilayah Jawa Barat maupun luar Pulau Jawa. Sebagian masyarakat memilih pindah ke area sekitar genangan, terutama bagi kalangan menengah ke atas yang masih memiliki lahan aman. Sedangkan warga dengan lahan terbatas, rata-rata hanya 0,3 bahu per kepala keluarga, memilih mengikuti program transmigrasi dengan harapan memperoleh lahan pertanian yang lebih luas, yakni sekitar 2,5 bahu per kepala keluarga.

Tabel 4. 1 Wilayah yang Terkena Dampak Pembangunan Jatigede

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
I	Wado	1. Padajaya 2. Cisurat 3. Wado	Tergenang Penuh Tergenang Sebagian Besar Tergenang Sebagian
II	Darmaraja	1. Leuwihideung 2. Jatibungur 3. Cibogo 4. Cipaku 5. Paku Alam 6. Karang Pakuan 7. Sukaratu 8. Sukamenak 9. Cikeusi 10. Tarunajaya 11. Darmajaya 12. Neglasari	Tergenang Penuh Tergenang Penuh Tergenang Penuh Tergenang Penuh Tergenang Sebagian Tergenang Sebagian Kecil Tergenang Sebagian Kecil Tergenang Sebagian Tergenang Sebagian Tergenang Sebagian Tergenang Sebagian Tergenang Sebagian
III	Jatigede	1. Sukakorsa 2. Jemah	Tergenang Penuh Tergenang Sebagian Kecil

		3. Cijeunjing 4. Ciranggem 5. Mekarasih 6. Cisampih	Tergenang Sebagian Kecil Tergenang Sebagian Kecil Tergenang Sebagian Kecil Tergenang Sebagian Kecil
IV	Jatinunggal	1. Pawenang 2. Sirnasari	Tergenang Sebagian Kecil Tergenang Sebagian Besar
V	Cisitu	1. Pejagan 2. Cigitung 3. Cisitu	Tergenang Sebagian Tergenang Sebagian Tergenang Sebagian

(Sumber: Buku Kajian nilai budaya lokal Jatigede di kabupate Sumedang.)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembangunan Waduk Jatigede membutuhkan lahan seluas kurang lebih 4.891,13 hektare yang mencakup 26 desa di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Jatigede, Darmaraja, Wado, Jatinunggal, dan Cisitu. Dari total desa tersebut, enam desa mengalami genangan secara keseluruhan, yaitu Desa Padajaya, Leuwihideung, Jatibungur, Cibogo, Cipaku, dan Sukakersa. Sementara desa-desa lainnya hanya sebagian wilayahnya yang tergenang, yang umumnya merupakan lahan pertanian produktif. Berdasarkan klasifikasi kondisi genangan, desa-desa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu desa yang tergenang seluruhnya, tergenang sebagian besar, dan tergenang sebagian kecil. Sebagai contoh, di Kecamatan Darmaraja terdapat 12 desa yang terdampak proyek ini, namun hanya empat desa yang benar-benar terendam seluruhnya, yaitu Leuwihideung, Jatibungur, Cibogo, dan Cipaku. Enam desa lainnya hanya mengalami genangan pada sebagian besar wilayahnya, sedangkan sisanya hanya tergenang sebagian kecil saja. Artinya, hanya penduduk dari empat desa di Kecamatan Darmaraja yang harus sepenuhnya meninggalkan tempat tinggal dan lahan pertaniannya karena wilayah mereka akan berada di dalam area genangan waduk. Sementara penduduk dari desa-desa yang hanya sebagian wilayahnya tergenang, umumnya cukup berpindah ke bagian desa yang tidak terdampak,

sehingga tidak perlu benar-benar meninggalkan kampung halamannya. Skema relokasi ini juga berlaku bagi desa-desa lain di kecamatan terdampak lainnya seperti Kecamatan Wado, di mana hanya Desa Padajaya yang mengalami genangan penuh, sementara dua desa lainnya tergenang sebagian. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, dan Cisitu. Penduduk dari desa-desa yang hanya sebagian wilayahnya terdampak umumnya memilih untuk bergeser ke lahan desa yang masih aman dari genangan.

4.1.1 Kondisi Geografis

Waduk Jatigede memiliki luas total area sebesar 106,24 km², yang mencakup sekitar 6,82% dari total wilayah Kabupaten Sumedang. Kawasan ini berada pada ketinggian rata-rata 310 meter di atas permukaan laut (mdpl), berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2024. Secara administratif, wilayah Jatigede terdiri dari 11 desa/kelurahan yang semuanya dikategorikan sebagai daerah lereng atau puncak. Hal ini memperlihatkan bahwa kawasan Jatigede memiliki topografi yang cenderung berbukit dan berlereng, yang tentunya berpengaruh terhadap aksesibilitas, tata ruang permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Jarak Jatigede dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang adalah sekitar 28 kilometer. Letak geografis ini membuatnya masih cukup terjangkau untuk diakses dari kota, namun tetap memiliki karakteristik pedesaan yang kuat. Selain itu, kondisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan area genangan waduk juga menjadikan kawasan ini mengalami transformasi besar dalam struktur ruang dan fungsi sosial setelah pembangunan waduk.

Dari sisi iklim dan cuaca, data dari BMKG Jatiwangi tahun 2024

menunjukkan bahwa suhu udara di Jatigede sepanjang tahun relatif tinggi, dengan suhu maksimum bulanan yang mencapai $37,4^{\circ}\text{C}$ pada bulan Oktober. Suhu minimum terendah tercatat di bulan April dan Juli (sekitar $20,2^{\circ}\text{C}$ – $20,4^{\circ}\text{C}$), sedangkan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 27 – 29°C . Hal ini menunjukkan bahwa Jatigede memiliki iklim tropis dengan kelembaban udara yang cukup tinggi, khususnya pada awal dan akhir tahun. Kelembaban maksimum sempat mencapai angka 94% pada bulan Januari, dan paling rendah berada pada kisaran 47–50% di bulan Oktober hingga Desember. Kecepatan angin di wilayah ini cenderung rendah sepanjang tahun, dengan peningkatan yang signifikan pada bulan Agustus dan September, mencapai maksimum 5,7 knot. Sementara itu, tekanan udara juga relatif stabil, dengan nilai rata-rata berkisar antara 1.004 hingga 1.011 mbar. Tekanan tertinggi tercatat di awal tahun, sementara di akhir tahun menunjukkan penurunan ringan. Dari segi curah hujan, wilayah Jatigede memiliki variasi yang cukup ekstrem sepanjang tahun. Puncak curah hujan terjadi pada bulan Februari dengan total 439 mm dan 25 hari hujan. Sebaliknya, musim kemarau sangat terasa pada bulan Agustus, dengan hanya 1 mm curah hujan dan 1 hari hujan. Penyinaran matahari tertinggi terjadi di bulan Oktober dengan rata-rata 87 jam, sedangkan bulan Februari menjadi bulan dengan intensitas penyinaran terendah, yaitu hanya 29 jam. Variasi ini menunjukkan bahwa Jatigede mengalami perbedaan musim yang cukup kontras, yang tentu berdampak pada aktivitas pertanian, perikanan waduk, serta pelaksanaan ritual tradisional seperti Larung yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Secara keseluruhan, kondisi geografis Jatigede yang berbukit, berlereng,

dan berada di ketinggian sedang memberikan pengaruh besar terhadap karakter budaya masyarakatnya. Lingkungan alam ini turut membentuk pola adaptasi sosial dan spiritual, termasuk dalam pelaksanaan ritual-ritual lokal yang berhubungan erat dengan alam dan perubahan ruang akibat pembangunan waduk.

4.1.2 Kondisi Demografis

Kecamatan Jatigede merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sumedang yang secara jumlah penduduk tergolong kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang (2025), jumlah penduduk di Jatigede pada tahun 2024 tercatat sebanyak 21.944 jiwa, atau hanya 1,85% dari total penduduk Kabupaten Sumedang yang mencapai 1.187.133 jiwa. Meskipun jumlahnya kecil, Jatigede memiliki peran penting dalam narasi pembangunan dan relokasi masyarakat pasca pembangunan Waduk Jatigede. Dari sisi kepadatan penduduk, Jatigede juga termasuk wilayah dengan tingkat kepadatan terendah, yaitu hanya 207 jiwa per km² (BPS Kabupaten Sumedang, 2025). Angka ini jauh di bawah rata-rata kepadatan Kabupaten Sumedang yang mencapai 762 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik permukiman yang menyebar dan belum mengalami urbanisasi tinggi. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk tinggal dalam lingkungan yang relatif tenang, namun di sisi lain dapat memunculkan tantangan dalam akses terhadap fasilitas publik yang merata.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, Jatigede mengalami pertumbuhan sebesar 0,05% per tahun selama periode 2020–2024 (BPS Kabupaten Sumedang, 2025). Pertumbuhan ini termasuk kategori sangat rendah, dan menunjukkan bahwa

tidak banyak mobilitas penduduk masuk ke wilayah ini dalam lima tahun terakhir. Salah satu penyebab stagnannya pertumbuhan ini bisa jadi karena belum berkembangnya sektor industri atau lapangan pekerjaan berskala besar di wilayah Jatigede. Penduduk yang masih tinggal cenderung adalah warga asli atau warga relokasi dari desa-desa yang tergenang waduk. Dari sisi rasio jenis kelamin, Jatigede mencatat angka 101, artinya terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di wilayah ini (BPS Kabupaten Sumedang, 2025). Ini menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang, yang biasanya menjadi indikator stabilnya struktur keluarga dan komunitas. Jika ditinjau berdasarkan kelompok usia, struktur demografis Jatigede didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni usia 15–64 tahun. Merujuk pada proyeksi penduduk dari BPS Sumedang tahun 2020–2035, kelompok usia produktif di kabupaten ini mencakup sekitar 67% dari total populasi. Meskipun tidak tersedia data rinci untuk tiap kecamatan, komposisi ini kemungkinan tidak jauh berbeda untuk Jatigede, mengingat tidak ada indikator khusus yang menunjukkan anomali demografis. Dominasi usia produktif ini mengindikasikan bahwa Jatigede masih memiliki potensi tenaga kerja lokal yang bisa diberdayakan, terutama untuk kegiatan pertanian, budaya, dan usaha mikro yang berkembang di daerah tersebut. Keberadaan kelompok usia non-produktif seperti anak-anak dan lansia juga tetap signifikan. Jumlah anak-anak usia 0–14 tahun dan lansia di atas 65 tahun menunjukkan bahwa keberlanjutan sosial di wilayah ini masih terjaga, dengan regenerasi yang berjalan normal dan peran keluarga besar dalam mengasuh dan merawat anggota keluarga yang lebih muda atau lanjut usia. Dalam tradisi

masyarakat Sunda, keberadaan orang tua dan lansia di dalam rumah tangga masih memiliki nilai yang penting secara sosial dan spiritual, termasuk dalam tradisi-tradisi seperti Ritual Larung yang melibatkan berbagai generasi.

Dari segi etnis dan bahasa, masyarakat Jatigede hampir seluruhnya adalah orang Sunda. Bahasa Sunda menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan di rumah, lingkungan sosial, dan kegiatan adat. Bahasa Indonesia digunakan terutama dalam konteks resmi atau ketika berinteraksi dengan pihak dari luar desa. Identitas kesundaan ini sangat kuat dan terlihat dalam pola komunikasi, struktur sosial, dan pelaksanaan upacara-upacara tradisional. Salah satu hal yang unik dari kondisi demografis Jatigede adalah keberlanjutan nilai-nilai sosial komunitas lama meskipun telah mengalami relokasi besar-besaran. Warga masih menjaga ikatan sosial yang kuat melalui kegiatan seperti gotong royong, pengajian, hingga pelaksanaan ritual adat seperti Larung. Proses adaptasi terhadap lingkungan baru dilakukan secara kolektif, dan ini menjadi bukti bahwa komunitas Jatigede berhasil mempertahankan jati dirinya meskipun mengalami perpindahan ruang secara fisik.

Dengan karakteristik demografis yang stabil dan dominasi usia produktif, wilayah ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan kegiatan berbasis komunitas, terutama dalam bidang kebudayaan dan pariwisata lokal. Namun, dukungan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi yang merata tetap dibutuhkan agar potensi ini bisa berkembang lebih optimal.

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

a) Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Jatigede secara umum masih didominasi oleh

sektor informal dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pak Sihabudin, selaku Ketua Lembaga Adat Jatigede, sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai pedagang kecil, pengelola tambak ikan di sekitar waduk, serta sebagian lainnya merantau ke kota-kota besar untuk bekerja, baik sebagai buruh maupun pekerja sektor jasa. Menurut beliau, kehadiran Waduk Jatigede turut membuka peluang baru bagi warga untuk memanfaatkan potensi perairan, khususnya melalui budidaya ikan dalam keramba atau tambak jaring apung. Aktivitas ini cukup membantu masyarakat dalam menopang perekonomian keluarga, meskipun skalanya masih terbatas.

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (2025) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 menunjukkan bahwa di tingkat Kabupaten Sumedang, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tersebar di beberapa kategori pekerjaan. Tercatat sebanyak 198.193 orang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, disusul oleh 119.214 orang yang bekerja sebagai usaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, serta 97.975 orang yang menjalankan usaha sendiri (BPS, 2025, Tabel 3.2.3). Jika ditinjau dari lapangan usaha utama, kategori terbanyak adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dengan total pekerja sebanyak 290.857 jiwa, kemudian industri pengolahan sebanyak 163.485 jiwa, dan sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 128.332 jiwa (BPS, 2025, Tabel 3.2.4). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian dan perikanan masih menjadi tumpuan di wilayah seperti Jatigede, secara keseluruhan struktur pekerjaan di Sumedang telah bergerak ke arah jasa dan industri ringan. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

masyarakat Jatigede secara sosial ekonomi masih berada dalam proses adaptasi dan pemulihan pasca relokasi. Peluang kerja yang tersedia di dalam desa lebih banyak berbasis usaha kecil dan pengelolaan sumber daya lokal, sementara sebagian warga lainnya mencari penghidupan di luar wilayah dengan bekerja di kota. Keterbatasan lapangan kerja formal dan infrastruktur ekonomi yang belum merata menjadi tantangan tersendiri yang perlu ditangani secara kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah daerah.

b) Kesehatan

Kondisi kesehatan di Kecamatan Jatigede dapat dikatakan cukup terbatas jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data dari Sumedang Regency in Figures 2025, hingga tahun 2024, tidak terdapat rumah sakit yang beroperasi di wilayah ini. Namun, tersedia satu poliklinik dan satu puskesmas yang menjadi fasilitas kesehatan utama bagi masyarakat di sana. Keberadaan dua fasilitas ini penting sebagai akses awal pelayanan medis dasar. Tenaga kesehatan yang tersedia di Jatigede pada tahun 2023 mencakup 12 tenaga keperawatan, 25 tenaga kebidanan, dan 1 tenaga kefarmasian. Jumlah ini tentu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan cakupan jumlah penduduk yang harus mereka layani. Selain itu, berdasarkan data dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024, terdapat 1 praktik dokter dan 15 praktik bidan di wilayah Jatigede. Praktik bidan yang cukup banyak menjadi penopang layanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam pelayanan kehamilan dan persalinan. Untuk pelayanan kesehatan keliling, pada tahun 2023 tercatat terdapat 1 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat milik Dinas Kesehatan yang beroperasi di wilayah

Jatigede. Keberadaan kendaraan ini cukup membantu menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses terutama di desa-desa yang berada di area perbukitan.

Dalam hal pelayanan kesehatan anak, jumlah Posyandu aktif di Jatigede pada tahun 2023 tercatat sebanyak 39 unit dengan 234 kader aktif. Posyandu berperan penting dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan edukasi kesehatan masyarakat. Namun demikian, kasus malnutrisi seperti balita kekurangan berat badan (*underweight*) sebanyak 126 kasus, *stunting* 122 kasus, *wasting* 53 kasus, dan *overweight* 40 kasus, masih menjadi perhatian yang cukup serius di wilayah ini (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024). Pada tahun yang sama, jumlah bayi di Jatigede tercatat sebanyak 242 jiwa, dan jumlah balita sebanyak 1.187 jiwa. Dari angka tersebut, 290 anak telah mendapatkan imunisasi, meskipun angka ini masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang merata bagi anak-anak di Jatigede. Selain itu, angka kelahiran hidup di Jatigede pada tahun 2023 mencapai 507 bayi dengan angka kelahiran mati sebanyak 2 kasus. Ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap aspek pelayanan persalinan dan kesehatan ibu selama masa kehamilan, yang sebagian besar masih ditangani oleh para bidan praktek.

Secara umum, kondisi kesehatan masyarakat di Jatigede masih menghadapi beberapa tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga jumlah tenaga kesehatan yang minim. Namun, adanya infrastruktur dasar seperti puskesmas, praktik dokter, dan jaringan Posyandu menjadi pondasi awal yang penting untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di masa depan.

c) Bencana

Wilayah Jatigede secara geografis memang memiliki kontur perbukitan dan

lereng yang rentan terhadap bencana alam. Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber statistik Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatigede dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami berbagai kejadian bencana, terutama tanah longsor, banjir, dan gempa bumi.

Pada tahun 2020, tercatat terjadi dua kali tanah longsor di Jatigede. Kemudian pada tahun 2021, intensitasnya meningkat menjadi empat kejadian longsor. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 tidak tercatat kejadian serupa, namun longsor kembali terjadi satu kali di tahun 2024. Selain tanah longsor, banjir juga menjadi salah satu bencana yang dialami masyarakat. Banjir tercatat pernah melanda wilayah ini sebanyak dua kali, yaitu masing-masing satu kali pada tahun 2021 dan 2024. Yang cukup mencolok adalah kejadian gempa bumi di tahun 2024, di mana dilaporkan telah terjadi sebanyak sebelas kali gempa yang dirasakan di wilayah Jatigede. Meskipun skalanya tidak disebutkan secara rinci, frekuensi yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa wilayah ini tidak sepenuhnya lepas dari potensi bencana geologis.

Melihat riwayat ini, masyarakat Jatigede tentu memiliki kerentanan tersendiri terhadap bencana. Apalagi sebagian masyarakat tinggal di daerah perbukitan, yang jika diguyur hujan lebat berisiko mengalami longsor atau jalan terputus. Maka dari itu, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan wilayah.

d) Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu delapan tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Sumedang, pada tahun 2016 angka kemiskinan berada di 10,57%. Angka ini sempat menurun berturut-turut hingga tahun 2019 menjadi 9,05%. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020 kembali mendorong peningkatan angka kemiskinan menjadi 10,26%. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren penurunan kembali, walau perlahan. Pada 2021 angkanya tercatat 10,71%, lalu turun ke 10,14% di tahun 2022, kemudian 9,36% pada 2023, dan yang terbaru pada 2024 tercatat sebesar 9,10%. Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam menanggulangi kemiskinan cukup membuahkan hasil.

Walaupun data tersebut merupakan representasi untuk skala kabupaten, kondisi di Jatigede sendiri secara tidak langsung juga menunjukkan tantangan ekonomi yang tidak jauh beda. Berdasarkan wawancara dengan Pak Sihabudin selaku Ketua Lembaga Adat, sebagian besar warga di Jatigede tidak bekerja sebagai pegawai tetap, melainkan berdagang kecil-kecilan, mengelola tambak ikan di area waduk, atau merantau ke kota besar untuk bekerja. Keadaan ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat di Jatigede masih bertumpu pada sektor informal dan belum sepenuhnya stabil.

4.1.4 Keadaan Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kecamatan Jatigede merupakan salah satu aspek penting yang patut diperhatikan dalam membicarakan pembangunan wilayah, terlebih lagi dalam konteks perubahan sosial pasca pembangunan Waduk Jatigede. Akses pendidikan menjadi hal yang sangat esensial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun di beberapa wilayah termasuk Jatigede, hal tersebut masih

menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi masyarakat Jatigede adalah persoalan akses terhadap satuan pendidikan, terutama pada jenjang menengah atas. Meskipun desa-desa di Jatigede seperti Ciranggem, Mekarasih, Cijeunjing, hingga Cisampih memiliki fasilitas pendidikan dasar dan sebagian memiliki SMP, namun untuk mengakses pendidikan SMA, para pelajar harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kecamatan lain seperti Darmaraja, Wado, atau bahkan ke pusat Kabupaten Sumedang. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri, baik secara waktu, biaya, maupun keamanan, terutama bagi pelajar yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Jarak antar desa di Kecamatan Jatigede juga relatif jauh dan sulit dijangkau, terlebih di daerah yang berada di sekitar genangan waduk. Beberapa desa bahkan terisolasi secara geografis, sehingga transportasi menjadi kendala yang nyata dalam keberlangsungan pendidikan anak-anak di sana. Tidak sedikit pelajar yang harus menumpang atau berjalan kaki jauh hanya untuk mencapai sekolah setiap harinya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya potensi putus sekolah, terutama bagi siswa-siswi dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki cukup dukungan logistik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang dalam publikasi "Sumedang Dalam Angka 2025", jumlah desa di Jatigede yang memiliki fasilitas SD stabil dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu sebanyak 11 desa. Untuk jenjang SMP, fasilitas sekolah hanya tersedia di 6 desa dari total keseluruhan desa di kecamatan tersebut. Sementara itu, tidak ada satu pun SMA yang berdiri di Jatigede hingga tahun 2024. Hanya terdapat satu SMK yang mulai tercatat sejak tahun 2021.

Di sisi lain, secara umum Kabupaten Sumedang mencatat angka partisipasi

pendidikan yang cukup tinggi. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2024 mencapai 97,78%, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berada di angka 101,62%. Meskipun demikian, untuk jenjang pendidikan menengah seperti SMP/MTs sederajat dan SMA/SMK sederajat, angka partisipasi mulai menurun. APM jenjang SMP tercatat sebesar 80,71%, sedangkan SMA/SMK/MA hanya sebesar 66,85%. Ini memperlihatkan adanya penurunan partisipasi saat beralih ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang bisa jadi berkaitan erat dengan sulitnya akses seperti yang terjadi di Jatigede. Tingkat melek huruf di Kabupaten Sumedang memang cukup baik, dengan rata-rata mencapai di atas 99% untuk kelompok usia produktif. Namun, kesenjangan geografis dan ketersediaan infrastruktur pendidikan tetap menjadi hambatan utama dalam pemerataan kualitas pendidikan. Di Jatigede sendiri, walaupun secara administratif terdata memiliki beberapa fasilitas sekolah, tetapi kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai. Beberapa sekolah bahkan belum memiliki fasilitas laboratorium, perpustakaan, atau tenaga pendidik yang mencukupi, dan banyak guru yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk mengajar.

Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun satuan pendidikan menengah di Jatigede. Selain itu, transportasi antar desa yang layak juga perlu diperkuat agar akses pelajar ke sekolah tidak menjadi alasan terhambatnya pendidikan. Upaya pemindahan penduduk akibat pembangunan Waduk Jatigede juga turut mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang direlokasi

sering kali harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sistem pendidikan baru, sementara tidak semua daerah relokasi memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam beberapa kasus, anak-anak terpaksa berhenti sekolah sementara waktu karena proses adaptasi ini. Secara keseluruhan, kondisi pendidikan di Kecamatan Jatigede dapat dikatakan masih membutuhkan peningkatan yang serius, baik dari segi infrastruktur, pemerataan fasilitas, tenaga pendidik, hingga dukungan logistik. Kesenjangan akses antar jenjang pendidikan menjadi tantangan utama, yang bila tidak segera diatasi, akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

4.1.5 Keadaan Agama & Aliran Kepercayaan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tahun 2024, penduduk Kecamatan Jatigede sebagian besar memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 23.068 jiwa. Selain itu, tercatat pula satu penganut agama Protestan. Tidak ada penduduk yang terdata secara resmi menganut agama Katolik, Hindu, Buddha, maupun aliran lainnya di kecamatan ini. Namun demikian, realitas sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat Jatigede menunjukkan bahwa selain menjalankan ajaran agama yang diakui negara, sebagian warga juga masih memegang nilai-nilai dan ajaran yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Hal ini menjadi bagian dari kearifan lokal dan praktik spiritual yang sering kali tidak tercatat secara administratif sebagai "aliran kepercayaan" namun tetap hidup di tengah masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan tersebut biasanya terwujud dalam bentuk tradisi adat, sesajen, doa-doa khusus, serta penghormatan terhadap tempat-tempat keramat seperti makam leluhur, pohon tua, atau sumber

mata air yang dianggap sakral. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jatigede tidak hanya menjalani kehidupan spiritual secara normatif-agamawi, tetapi juga secara kultural. Oleh karena itu, meskipun data statistik menyebutkan hanya satu agama yang dominan, keberagaman praktik kepercayaan tetap menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat.

a) Kepercayaan terhadap Leluhur

Masyarakat Jatigede, khususnya di wilayah pedesaan, masih menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan terhadap leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Kepercayaan ini tercermin melalui berbagai bentuk larangan dan ungkapan-ungkapan tradisional yang dikenal sebagai pamali. Pamali ini mengatur batasan dalam kehidupan sehari-hari, yang dipercaya dapat membawa kesialan atau musibah jika dilanggar.

Salah satu contohnya adalah adanya larangan dalam waktu tertentu setiap bulan, yang disebut sebagai bulan larangan. Berdasarkan hitungan khusus yang hanya dipahami oleh para tokoh adat atau orang tua (kokolot), pada hari tertentu dalam bulan tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penting seperti pernikahan, sunatan, hajatan besar, maupun pembangunan rumah. Keyakinan ini dilandasi oleh anggapan bahwa melanggar aturan waktu tersebut akan mendatangkan hal-hal buruk. Selain itu, terdapat pula ungkapan-ungkapan lokal yang penuh makna simbolik, seperti “utah luang cau sisi na, panwti hisi kasingsat” yang secara harfiah berarti larangan makan bagian pinggir pisang karena dipercaya bisa membawa malapetaka. Ungkapan lain seperti kedah kial heums saperlos harupal, ulah geutas harupateun juga mengandung pesan filosofis untuk

hidup sabar, kuat, dan tidak gegabah dalam bertindak. Konsep spiritual lainnya yang masih hidup dalam masyarakat adalah Mupusti, yaitu bentuk ikhtiar agar niat dan tujuan seseorang mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini menunjukkan adanya perpaduan antara unsur religius formal dengan spiritualitas tradisional yang berbasis leluhur. Dalam kegiatan pertanian, masih ada yang melaksanakan ritual-ritual adat sebagai bagian dari penghormatan terhadap alam dan siklus kehidupan. Misalnya, sebelum memulai musim tanam dilakukan mitembeyan, yaitu prosesi khusus untuk memohon kelancaran dalam bertani. Sementara itu, sebelum panen padi, diadakan ritual nyawen, yang melibatkan penyediaan sesajen seperti daun hanjuang, jawer kotok, dan daun kawung yang ditempatkan di sawah. Prosesi ini biasanya diiringi dengan doa atau mantra untuk Dewi Sri, yang dipercaya sebagai simbol kemakmuran dan pelindung hasil pertanian. Dalam bidang pembangunan rumah pun masih ditemukan prosesi adat yang dilakukan untuk menolak bala. Biasanya, sebelum mendirikan rumah, masyarakat menggali lubang untuk menyimpan berbagai benda seperti kelapa muda, darah ayam, dedaunan tertentu, dan beras kencur, yang kemudian dibungkus kain putih dan ditutup dengan bendera merah putih. Tujuannya adalah untuk memohon keselamatan dari leluhur. Setelah rumah selesai dibangun, simbol-simbol penolak bala seperti padi, pisang, dan pakaian suami-istri diletakkan di atap rumah.

Meski begitu, tradisi-tradisi ini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan praktik-praktik tersebut karena dianggap merepotkan atau tidak relevan lagi dengan kehidupan masa kini. Namun, nilai-nilai ini tetap menjadi warisan budaya yang

mencerminkan kedalaman spiritual masyarakat Jatigede.

b) Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Adat

Kepercayaan masyarakat Jatigede terhadap upacara adat masih sangat kuat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi dan adat istiadat tetap dilestarikan, mulai dari upacara pertanian seperti mipit, hingga wuku taun atau ngarot, yang merupakan bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah. Dalam upacara ngarot, masyarakat secara spontan berkumpul membawa hasil pertanian seperti pisang, jagung, dan padi ke tempat pelaksanaan upacara untuk disalamekan, yaitu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu keunikan upacara ini adalah penyembelihan kerbau, di mana bagian kepalanya dikubur sebagai simbol penghormatan. Upacara ini ditutup dengan ikrar yang dibacakan oleh pemimpin upacara, disertai mantra atau jampe yang memanjatkan doa kepada Allah SWT. Kepercayaan masyarakat juga tercermin dalam penghormatan terhadap Dewi Sri atau Nyi Pohaci, yang diyakini bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai simbol kemakmuran yang telah memberi makan mereka. Oleh karena itu, masyarakat menunjukkan penghargaan tinggi terhadap Dewi Sri melalui berbagai upacara seperti sawen, mipit, dan ngala. Selain upacara pertanian, masyarakat juga melaksanakan upacara daur hidup seperti opat bulanan dan njuh bulanan saat kehamilan, serta ekahan (akikah) ketika anak lahir, dan tahlilan ketika seseorang meninggal dunia. Bahkan dalam prosesi membawa bali (tali ari-ari), terdapat tata cara khusus seperti tidak boleh berbicara selama perjalanan menuju tempat penguburan. Tradisi lain yang unik adalah Hajat Mulud, di mana masyarakat membawa air dari sumber mata air (sirah cai) ke Bale Dusun disertai nasi yang

kemudian dikeringkan menjadi aron. Aron dipercaya memiliki kekuatan untuk menolak bala seperti hama dan angin puting beliung. Dalam seni tradisional, kesenian Karinding juga turut menjadi bagian dari spiritualitas masyarakat.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap tanah kelahiran mereka yang telah tenggelam akibat pembangunan Waduk Jatigede, masyarakat mengadakan tradisi larung. Larung menjadi simbol rasa syukur, doa, dan penghormatan terhadap leluhur serta tempat tinggal yang telah memberikan kehidupan. Tradisi ini juga menjadi pengingat akan identitas budaya yang terus dijaga meski telah berpindah tempat tinggal. Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya ritual Larung Jatigede yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

4.2 Ritual Larung di Jatigede Sumedang

Ritual larung di Jatigede merupakan bentuk ekspresi budaya yang tumbuh dari pengalaman sosial yang cukup kompleks, yakni perpindahan masyarakat akibat pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketika bendungan raksasa ini resmi dibangun, ia tidak hanya mengubah bentang geografis wilayah, tapi juga menyapu bersih banyak kenangan kolektif yang tersimpan dalam ruang-ruang hidup masyarakatnya. Kampung halaman yang selama puluhan bahkan ratusan tahun menjadi tempat berpijak, akhirnya harus dikorbankan demi pembangunan nasional. Dalam kondisi seperti inilah, muncul kebutuhan dari masyarakat untuk tetap terhubung secara spiritual dan kultural dengan tanah yang telah ditinggalkan. Larung menjadi medium yang dipilih masyarakat Jatigede untuk menjembatani kehilangan tersebut. Ritual ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk keberlanjutan hubungan antara manusia, alam, dan para leluhur.

Ia hadir sebagai wujud dari upaya masyarakat untuk merawat ingatan kolektif sekaligus sebagai sarana penghormatan terhadap tempat tinggal yang telah tenggelam di balik permukaan air waduk. Pelaksanaan larung bisa dibaca sebagai cara masyarakat untuk "berbicara" kembali dengan kampung halamannya, tidak secara fisik, tapi lewat simbol, doa, dan praktik budaya yang bermakna.

Meski disebut sebagai ritual larung, praktik ini tidak sepenuhnya berlangsung di atas air. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga mengadakan sejumlah kegiatan di daratan, seperti ziarah ke makam-makam yang telah direlokasi ke area perbukitan, pementasan seni tari seperti tarian umbul yang sarat makna simbolik, hingga diskusi atau talkshow bersama para budayawan dan akademisi yang membahas nilai-nilai lokal serta perubahan sosial yang dialami masyarakat Jatigede. Kegiatan-kegiatan ini memperkaya makna larung dan memperlihatkan bahwa ia bukan hanya ritual spiritual, tapi juga peristiwa budaya yang menyatukan banyak elemen: spiritualitas, sejarah, seni, bahkan aktivisme kultural. Fungsi ritual ini pun berkembang, dari yang awalnya bersifat spiritual dan personal menjadi ruang bersama yang bersifat publik dan komunal. Dalam konteks ini, larung berperan penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Jatigede yang sempat tercerabut akibat relokasi. Melalui ritual ini, masyarakat berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah modernisasi dan pembangunan yang seringkali menyingkirkan nilai-nilai lokal. Larung menjadi penanda bahwa meskipun secara fisik ruang hidup mereka telah berubah, namun nilai-nilai budaya, hubungan spiritual dengan tanah leluhur, dan solidaritas sosial antarwarga masih tetap dipertahankan. Tradisi larung juga menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk

berdialog dengan sejarah mereka sendiri. Alih-alih menolak perubahan secara frontal, mereka justru mengolah trauma menjadi energi budaya. Ini terlihat dari keterlibatan lintas generasi dalam pelaksanaannya, baik tua maupun muda, yang menunjukkan adanya proses transfer nilai dan pengetahuan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ritual ini bukan sekadar tentang masa lalu yang diratapi, tetapi juga tentang masa depan yang ingin terus dibangun, dengan fondasi budaya yang kokoh

4.2.1 Sejarah Ritual Larung Jatigede

Ritual Larung Jatigede tidak lahir dari kekosongan. Tradisi ini berakar kuat pada perjalanan sejarah panjang masyarakat di sekitar wilayah Waduk Jatigede yang dahulu merupakan kawasan hidup dan berkembangnya Kerajaan Sumedang Larang. Sebelum genangan menelan tanah-tanah pertanian, pemukiman, dan situs-situs leluhur, wilayah seperti Leuwi Hideung merupakan pusat aktivitas masyarakat adat yang kehidupannya sangat lekat dengan spiritualitas lokal dan nilai-nilai warisan leluhur.

Dalam catatan sejarah, Kerajaan Sumedang Larang diperkirakan berdiri sejak abad ke-15 dan merupakan penerus dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kekuatan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Tatar Sunda, sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Cirebon, Banten, dan Demak. Namun, jauh sebelum Sumedang Larang dikenal secara politik dan administratif, benih kebudayaannya telah tumbuh dari wilayah-wilayah kecil yang kini terendam Waduk Jatigede. Salah satunya adalah kawasan Tembong Agung, yang diyakini sebagai titik awal berdirinya kerajaan tersebut. Tembong

Agung sendiri memiliki cerita rakyat yang masih diingat kuat oleh masyarakat lokal hingga kini. Dalam wawancara dengan ketua lembaga adat, dijelaskan bahwa dahulu kala seorang tokoh dari Pajajaran melakukan perjalanan menyusuri Sungai Cimanuk dengan rakit hingga akhirnya tiba di Leuwi Hideung. Di sana, ia bertemu dan ditolong oleh dua sesepuh kampung: Eyang Haji Abdul Saka dan Eyang Bangsa Wacana. Dari pertemuan tersebut lahirlah sebuah padepokan yang kemudian dinamakan Tembong Agung. Tempat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya kekuasaan Sumedang Larang.

“Sebenarnya sejarah Sumedang tidak bisa dilepaskan dari Tembong Agung... jadi kalau kita bicara Larung, kita juga bicara tentang fondasi awal Sumedang itu sendiri,” ujar kuncen dalam wawancara. Nama “Larung” merupakan akronim dari Mulasara Tembong Agung, yang berarti menjaga dan merawat peninggalan sejarah Tembong Agung. Dalam hal ini, ritual Larung bukan hanya bentuk penghormatan terhadap situs sejarah, tetapi juga menjadi penanda bahwa masyarakat tidak ingin kehilangan jejak identitasnya yang telah berakar jauh sebelum negara hadir dengan proyek-proyek besar seperti bendungan. Ritual ini juga menjadi media perlawanan kultural yang halus. Ketika proyek Waduk Jatigede mengusur lebih dari 28.000 jiwa dari 5 kecamatan dan 26 desa, masyarakat tidak serta-merta tunduk dalam diam. Sebaliknya, mereka meresponsnya dengan merawat ingatan kolektif melalui tradisi. Dalam kata-kata salah satu warga:

“Hidup juga harus berlanjut, tapi kita juga harus ngamumule dengan cara ikut andil dalam tradisi Larung ini, semoga di-ridhoi oleh Allah”. Melalui Ritual Larung, masyarakat Jatigede mengikat kembali benang sejarah yang sempat

tercerabut oleh proyek pembangunan. Mereka menyambungkan masa lalu dan masa kini melalui tindakan simbolik seperti ziarah ke makam leluhur yang telah direlokasi ke bukit, prosesi upacara di daratan maupun di atas air, hingga pertunjukan kesenian seperti tarian umbul dan diskusi budaya. Meski kini telah menjadi agenda budaya tahunan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, nilai inti dari Larung tetap terjaga sebagai bentuk ngamumule atau pemeliharaan terhadap warisan nilai-nilai luhur. Tidak hanya sekadar acara ritualistik, Larung menjadi ruang edukasi lintas generasi yang memperkenalkan kembali siapa leluhur mereka, dari mana mereka berasal, dan mengapa menjaga ingatan menjadi penting.

Dengan demikian, Ritual Larung Jatigede tidak hanya merepresentasikan spiritualitas masyarakat pasca-penggusuran, tetapi juga menjembatani sejarah panjang Kerajaan Sumedang Larang dengan identitas masyarakat hari ini. Larung adalah cara masyarakat Jatigede untuk berkata: tanah kami boleh hilang secara fisik, tapi tidak dengan sejarah dan ingatan kami

4.2.2 Tahapan Ritual Larung Jatigede

Ritual Larung Jatigede merupakan prosesi budaya yang diselenggarakan untuk mengenang kampung halaman masyarakat yang kini telah terendam oleh Waduk Jatigede. Ritual ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga menjadi ekspresi spiritual masyarakat dalam menjaga hubungan batin dengan tanah asal mereka. Sebagaimana terekam dalam wawancara, ritual ini berlangsung setiap tahun di lokasi yang kini sudah menjadi kawasan genangan waduk, namun sebagian acaranya juga dilakukan di darat seperti ziarah ke makam yang telah direlokasi, pertunjukan kesenian, hingga talkshow budaya yang

menghadirkan akademisi, tokoh adat, dan pejabat pemerintah. Prosesi ritual Larung terdiri dari tiga bagian utama yang saling berkaitan, yakni pra-ritual, ritual, dan pasca-ritual. Masing-masing tahapan memiliki makna simbolik yang khas dan peran sosial yang penting bagi masyarakat Jatigede.

a) Pra Ritual

Tahapan awal dalam pelaksanaan ritual larung dimulai dari tahap persiapan yang berlangsung beberapa hari sebelum acara inti. Persiapan ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat bersama Lembaga Adat Jatigede. Salah satu hal yang sangat mencolok dalam tahap ini adalah antusiasme warga yang menyumbangkan berbagai macam kebutuhan logistik secara sukarela. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menyumbangkan ikan sebanyak satu kuintal, beras puluhan kilogram, dan berbagai kebutuhan konsumsi lainnya seperti kopi dan air mineral. Semua ini dilakukan tanpa permintaan khusus dari panitia, namun atas dasar kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap tradisi tersebut.

Selain logistik, tahapan ini juga mencakup persiapan perlengkapan ritual seperti sesajen, umbul-umbul, replika benda pusaka, dan obor-obor yang akan digunakan dalam prosesi. Sesajen yang disiapkan terdiri dari berbagai elemen simbolik seperti buah-buahan, kue tradisional, beras, dan bunga tujuh rupa. Semua perlengkapan tersebut disusun dan diberkahi melalui doa-doa adat yang dipanjatkan oleh para tokoh adat. Seperti yang disebutkan oleh Ketua Lembaga Adat : "Biasanya seminggu sebelum acara, masyarakat sudah mulai kumpul. Ada yang jaga logistik, ada yang atur pentas. Tapi yang paling penting itu koordinasi sama yang dituakan." Latihan tarian dan gladi bersih juga dilakukan menjelang hari

pelaksanaan, khususnya oleh kelompok seni tradisi yang akan tampil dalam prosesi seperti penari umbul, serta tim musik pengiring. Pemasangan dekorasi dan penataan titik-titik lokasi kegiatan dilakukan hingga malam hari menjelang pelaksanaan.

b) Ritual

Gambar 4. 5 Suasana Sakral di Makam Leluhur



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Tahapan ritual larung dimulai dengan kegiatan ziarah ke makam para leluhur yang telah direlokasi ke daerah perbukitan akibat tergenangnya desa-desa lama. Kegiatan ini menjadi simbol penghormatan terhadap karuhun atau leluhur, sekaligus upaya untuk menjaga kesinambungan spiritual antara generasi masa kini dengan masa lalu. Dalam suasana khushyuk, masyarakat berkumpul di kompleks pemakaman, ada juga sejumlah sesajen yang disimpan di dalam rakit, setelah itu membacakan doa bersama yang dipimpin tokoh adat atau tokoh agama. Doa-doa tersebut tidak hanya memohon keselamatan, tetapi juga sebagai bentuk memelihara memori akan kampung halaman yang telah hilang di balik genangan air waduk.

Setelah prosesi ziarah selesai, masyarakat kemudian melakukan kegiatan

"*ngabring*" yakni arak-arakan yang dilakukan secara massal. Rombongan berjalan kaki dari makam menuju tepi waduk dengan membawa berbagai perlengkapan ritual seperti umbul-umbul, obor, sesajen yang telah diberkahi, serta atribut simbolik lainnya. Sepanjang perjalanan, iringan ini diiringi oleh tabuhan musik tradisional Sunda, menciptakan suasana sakral sekaligus semarak. Pakaian yang dikenakan peserta umumnya merupakan busana adat Sunda, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya.

Gambar 4. 6 Sambutan dari Para Penari Tari Umbul

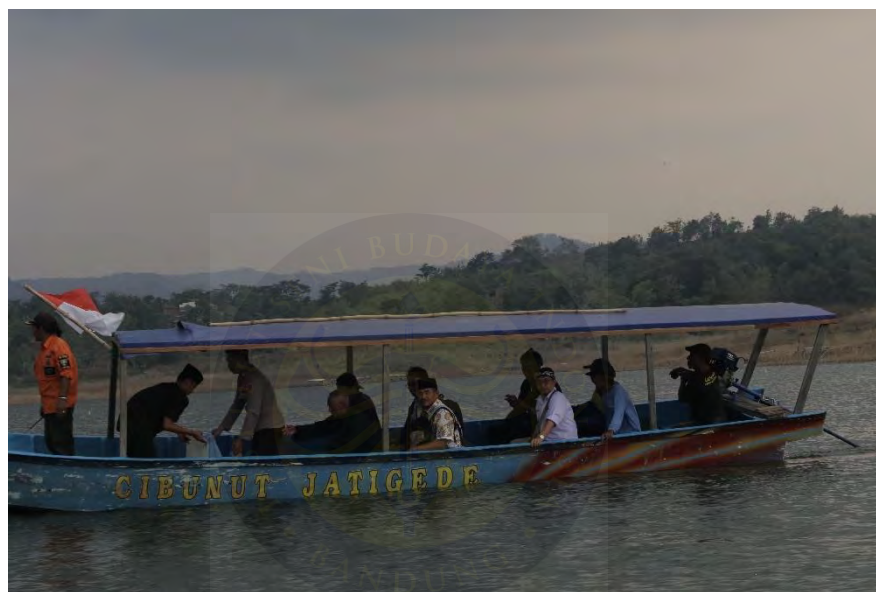


(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sesampainya di tepi waduk, masyarakat disambut oleh penari umbul yang tampil membawakan tarian sakral. Tarian ini merupakan bentuk representasi spiritual untuk menyambut roh-roh leluhur, sekaligus simbol harapan dan rasa syukur. Tari umbul juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural yang diyakini masih mengawasi kehidupan masyarakat Jatigede. Dalam tahap ini, sesajen kembali diletakkan di altar khusus, dan dilakukan

pemanjatan doa oleh sesepuh adat. Sebelum melanjutkan prosesi pelarungan, dilakukan juga penanaman pohon secara simbolik oleh para tokoh masyarakat. Aksi ini bukan hanya bentuk dari kearifan lokal terhadap alam, melainkan juga bagian dari nilai edukatif bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.

Gambar 4. 7 Para Tokoh Penting Mulai Menaiki Perahu



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Setelah semua rangkaian di darat selesai, prosesi ritual berpindah ke atas air. Para tokoh adat, budayawan, serta perwakilan masyarakat naik ke perahu-perahu tradisional dan rakit khusus yang telah dihias dengan ornamen adat. Rakit inilah yang membawa sesajen utama, yang terdiri dari berbagai elemen simbolis: aneka buah, telur, serta benda-benda pusaka atau representasinya, sebagai bentuk persembahan kepada arwah leluhur yang pernah tinggal di wilayah yang kini menjadi waduk. Pada tahapan ini tidak hanya satu perahu tapi banyak perahu warga juga yang ikut menyaksikan dan ikuta mengantarkan sesajen yang dilarungkan ke tengah waduk, pada momen ini pula pemandangan Waduk Jatigede

memperlihatkan pesonanya karena tahapan ini dilakukan pada sore hari dan menjelang terbenam nya matahari yang membuat para pengunjung takjub melihat Jatigede.

Gambar 4. 8 Prosesi Melarungkan Sesajen



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Di atas air, rakit mengarah ke titik yang diyakini sebagai pusat wilayah terdalam atau titik genangan utama. Di sana, sesajen dilabuhkan ke air dengan iringan doa, harapan, dan mantra yang dibacakan oleh sesepuh. Salah satu responden menyatakan, *“Sesajen ieu henteu pikeun disembah, tapi pikeun mengenang, pikeun ngahaturkeun nuhun ka karuhun nu pernah cicing di ditu”* (Sesajen ini bukan untuk disembah, tetapi untuk mengenang dan berterima kasih kepada leluhur yang pernah tinggal di sana) . Selain pelarungan sesajen, dilakukan juga penebaran benih ikan ke perairan waduk. Aktivitas ini dilakukan oleh warga, pemuda, hingga tokoh masyarakat sebagai bentuk simbolik “menghidupkan

kembali” perairan yang dahulu merupakan tempat tinggal mereka. Penebaran benih ini juga bermakna ekologis sebagai upaya konservasi.

Gambar 4. 9 Talkshow Bersama Ketua LAD, Kabid Kebudayaan, dan Akademisi



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Setelah semua aktivitas air selesai, peserta kembali ke darat. Di sana, ritual dilanjutkan dengan talkshow budaya yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang: akademisi, budayawan, dinas kebudayaan, hingga tokoh adat. Talkshow ini menjadi ruang diskusi reflektif yang tidak hanya membedah makna dari pelarungan, tetapi juga membicarakan tantangan pelestarian budaya lokal di tengah modernisasi dan dampak pembangunan. Lalu acara ditutup dengan pertunjukan seni tradisional lainnya seperti angklung buncis, dan pembacaan pidato, menguatkan pesan bahwa budaya lokal masih hidup dan terus diwariskan.

c) Pasca Ritual

Pasca ritual merupakan fase akhir dari keseluruhan rangkaian, namun memiliki

peran penting sebagai refleksi kolektif. Setelah seluruh prosesi selesai, masyarakat, panitia, dan para tokoh adat melakukan ngariung atau kumpul bersama. Kegiatan ini menjadi ruang informal yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan ritual, termasuk menyampaikan kesan dan pesan dari para tokoh serta peserta. Menurut pernyataan Bapak Sihabudin, Ketua Lembaga Adat Jatigede, evaluasi ini mencakup berbagai aspek teknis dan substansi kegiatan. Ia menyampaikan bahwa setelah acara, seluruh pihak berkumpul membahas jalannya ritual, seperti efektivitas pelarungan, partisipasi masyarakat, hingga tantangan dalam menjaga keberlangsungan tradisi. "*Kami bahas bareng, mana nu kedah dirapihkeun, mana nu tos saé, supados tahun payun langkung saé deui*" (Kami bahas bersama, mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah baik, agar tahun depan lebih baik lagi). Selain evaluasi, pasca-ritual juga menjadi ruang penguatan jaringan antarwarga. Masyarakat saling berbagi cerita, mempererat silaturahmi, bahkan menjalin kerja sama baru dalam upaya pelestarian budaya. Tidak sedikit pula warga yang mengusulkan ide-ide baru untuk ritual berikutnya, seperti penambahan konten edukatif untuk generasi muda atau penguatan dokumentasi acara.

Suasana pasca-ritual juga diisi dengan makan bersama hasil dari sumbangan warga. Hidangan disajikan secara sederhana namun meriah, menjadi bentuk rasa syukur bersama. Momen ini menandai bahwa ritual larung bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan ruang yang mempererat ikatan sosial, memperkuat identitas budaya, dan menumbuhkan harapan baru bagi masa depan masyarakat Jatigede.

4.2.3 Aktor dan peran partisipan

Ritual larung Jatigede merupakan manifestasi budaya masyarakat yang menyatukan unsur spiritual, sosial, dan historis. Di balik prosesi sakral ini, terdapat berbagai aktor yang memainkan peran penting dalam menyelenggarakan dan menjaga kesinambungan tradisi tersebut. Setiap aktor, dari tokoh adat hingga masyarakat umum, memiliki kontribusi tersendiri yang saling melengkapi.

a) Ketua Lembaga Adat

Gambar 4. 10 Pak Sihabudin sebagai Ketua LAD



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Ketua Lembaga Adat merupakan tokoh sentral yang bertindak sebagai pengarah utama dalam seluruh rangkaian ritual larung. Ia tidak hanya menentukan waktu pelaksanaan dan susunan acara, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat tetap terjaga. Ketua adat juga menjadi jembatan antara nilai-nilai leluhur dan konteks kekinian. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat dalam wawancara, “Kami menentukan tanggal dan urutannya. Kalau kami bilang

ritual itu penting, warga pasti ikut karena ini menyangkut hubungan dengan tanah karuhun.”

b) Dinas Kebudayaan

Gambar 4. 11 Pak Budi Sobar KABID Kebudayaan DISPARBUDPORA Kab. Sumedang



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan turut berperan aktif dalam menyukseskan ritual larung, terutama sebagai fasilitator teknis dan pelindung legalitas acara. Kehadiran dinas ini sangat penting, mengingat ritual larung kini telah menjadi bagian dari agenda kebudayaan tahunan daerah. Selain membantu dari sisi logistik dan perizinan, mereka juga mendukung keberlanjutan tradisi dengan mendokumentasikan kegiatan dan membantu mempublikasikan ke tingkat provinsi dan nasional sebagai warisan budaya tak benda. Keterlibatan ini menjadi sinyal bahwa negara hadir mendukung akar budaya masyarakat lokal.

c) Akademisi dan Budayawan

Gambar 4. 12 Para Akademisi dan Budayawan



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Ritual larung juga melibatkan akademisi, peneliti, serta budayawan yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan talkshow dan diskusi publik. Mereka memberikan pandangan teoritis dan kontekstual, membantu masyarakat memahami dimensi filosofis dan sosiologis dari praktik budaya ini. Talkshow ini sering membahas kaitan antara perubahan sosial akibat pembangunan waduk dengan upaya masyarakat dalam mempertahankan identitas budayanya. Melalui mereka pula, tradisi larung bisa dikaji dan diarsipkan sebagai bagian dari studi kebudayaan Nusantara.

d) Kuncen

Gambar 4. 13 Wawancara dengan Kuncen

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Kuncen atau juru kunci memiliki peran penting, khususnya dalam bagian awal ritual yang dilakukan di makam-makam para leluhur yang telah direlokasi ke bukit. Ia bertugas memimpin doa-doa, menjaga kesakralan makam, dan mengawasi tata cara ziarah agar tidak menyimpang dari adat. Keberadaan kuncen menjadi simbol hubungan antara masa lalu dan masa kini. Ia diyakini sebagai perantara antara dunia nyata dan dunia karuhun (leluhur), sehingga posisinya sangat dihormati dalam struktur sosial adat.

e) Penari Tari Umbul dan Seniman Angklung Buncis

Gambar 4. 14 Penari tari Umbul dan Seniman Angklung Buncis



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Tari Umbul merupakan elemen penting dalam prosesi larung karena menjadi simbol ekspresi jiwa dan doa masyarakat. Para penari mayoritas adalah perempuan muda menari dengan iringan musik tradisional Angklung Buncis sebagai bentuk penghormatan terhadap alam, leluhur, dan kehidupan yang telah berubah. Tarian ini biasanya dilakukan di area terbuka sebelum peserta ritual menuju perahu. Selain tari Umbul, seniman Angklung Buncis juga terlibat dalam iringan musik tradisional, karena terasa kurang lengkap jika tarian tidak diiringi dengan alat musik tradisional, dan juga Angklung Buncis ini juga menjadikan salah satu ciri khas pada pementasan yang ada di Ritual Larung, pembacaan puisi, hingga pementasan simbolik. Mereka adalah penjaga dimensi estetika dan spiritual dari ritual tersebut.

f) Warga Masyarakat

Gambar 4. 15 Antusias warga melihat Ritual Larung

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Kekuatan utama dari ritual larung terletak pada partisipasi warga masyarakat yang begitu tinggi. Tidak ada paksaan atau panitia resmi, tetapi warga secara sukarela menyumbangkan makanan, tenaga, hingga perlengkapan ritual. Dalam transkrip disebutkan, terdapat warga yang menyumbangkan ikan sebanyak satu kuintal, beras puluhan kilogram, dan perlengkapan upacara lainnya. Mereka juga menjadi pengiring prosesi dengan membawa umbul-umbul dan sesajen. Pak Sihabudin pada wawancara juga menyatakan, “*Nu nyumbang mah loba. Aya nu mawa lauk, beas, jeung baju-baju adat. Henteu disuruh ogé arék nyumbang asal bisa nyambung jeung karuhun.*” Karena ini sudah bisa terlihat antusias masyarakat dalam Ritual Larung itu sangat besar dan inilah yang menjadi kekuatan ritual karena semakin banyak yang berpartisipasi akan semakin terasa.

g) Remaja dan Anak-anak

Gambar 4. 16 Gambar 16 Banyaknya remaja dan anak-anak yang berpartisipasi



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Meskipun tidak memegang peran strategis, anak-anak dan remaja dilibatkan dalam berbagai bagian prosesi, seperti membawa umbul-umbul, menabur benih ikan, hingga membantu penataan acara. Keterlibatan ini bertujuan menanamkan nilai budaya sejak dini, agar mereka kelak menjadi penjaga keberlanjutan tradisi larung.

h) Panitia Lapangan

Gambar 4. 17 Foto bersama penyelenggara beserta panitia acara



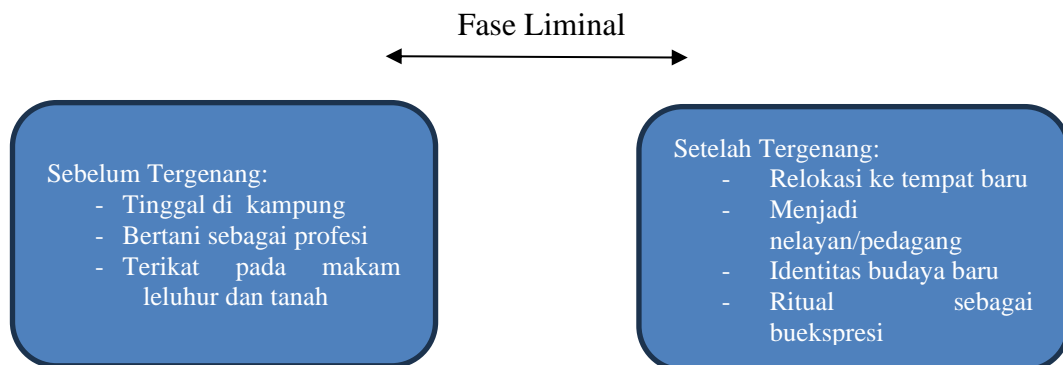
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Panitia yang bertugas mengatur teknis acara. Mereka menyiapkan tempat, logistik, jalur jalan bersama, memastikan keselamatan saat menyeberang ke tengah waduk, dan sebagainya. Mereka adalah aktor di balik layar yang krusial bagi kelancaran pelaksanaan. Ritual larung Jatigede bukanlah pertunjukan satu arah, melainkan ruang bersama yang digerakkan oleh banyak tangan dengan semangat kolektif. Setiap aktor, baik tokoh utama seperti Ketua Lembaga Adat dan Dinas Kebudayaan, maupun warga biasa, kuncen, hingga anak-anak, saling melengkapi dan memperkuat makna spiritual dan sosial dari upacara tersebut. Mereka bukan hanya pelaksana, tetapi sekaligus penutur, penjaga, dan penghidup kebudayaan yang terus bertransformasi dalam ruang yang kini telah berubah menjadi waduk namun tetap berakar pada tanah kenangan.

4.3 Ritual Larung Jatigede dalam Perspektif Liminalitas Victor Turner

Pembahasan ini berlandaskan teori liminalitas dari Victor Turner yang membagi pengalaman transisi sosial budaya ke dalam tiga tahap utama: separation, liminality, dan incorporation. Konsep ini relevan dalam memahami bagaimana masyarakat Jatigede mengalami perubahan mendalam akibat tergenangnya wilayah mereka oleh pembangunan Waduk Jatigede, sikap mereka setelah tempat tinggalnya tergenang dan dampak bagi kehidupan keseharian mereka dan bagaimana mereka menjawab perubahan itu melalui tradisi Ritual Larung, dan apa yang didapat setelah adanya tradisi Ritual Larung.

Gambar 4. 18 Visualisasi fase liminal yang dialami oleh Masyarakat Jatigede



Letak Liminalitas: Kehilangan arah, kekosongan sosial, krisis identitas

4.3.1 *Separation*

Tahap *separation* dalam teori Turner menggambarkan proses pelepasan individu atau kelompok dari keadaan sosial sebelumnya. Dalam konteks masyarakat Jatigede, tahap ini ditandai dengan peristiwa tergenangnya kampung-kampung tempat tinggal mereka. Proses ini bukan hanya secara fisik memisahkan masyarakat dari tanah kelahiran, tetapi juga secara psikologis mengguncang identitas mereka sebagai komunitas.

Warga Jatigede yang sebelumnya tinggal di daerah subur seperti Leuwi Hideung, Cipaku, Cibogo, dan desa lain, harus direlokasi akibat proyek nasional Waduk Jatigede. Hal ini berdampak besar terhadap kehidupan mereka secara ekonomi, sosial, hingga spiritual. Seorang warga, sebut saja Pak Nanang, dalam wawancaranya menyatakan “Perasaanya pasti sedih ya, apalagi udah berkaitan dengan tempat tinggal dan kerjaan...” dan pada kenyataannya, pemisahan ini tidak berjalan dengan lancar. Banyak warga yang menolak untuk pindah karena kompensasi tidak sesuai, atau karena ikatan emosional yang kuat terhadap tanah mereka. Bahkan disebutkan bahwa pada masa awal penggenangan, masih ada

rumah yang belum dikosongkan, dan warga kebingungan karena akses jalan pun terputus. Hal ini menggambarkan betapa traumatisnya tahap pemisahan ini. Pak Nanang menyatakan “...banyak orang meninggal, udah gitu juga jadi banyak perceraian, pokonya dampak ini tuh ekonomi lah a...”

4.3.2 Liminality

Liminality menurut Turner adalah masa transisi yang penuh ketidakpastian, fase kekosongan, dan merada di ambang ketika seseorang atau komunitas belum memiliki tempat yang pasti dalam struktur sosial baru. Masyarakat Jatigede mengalami fase liminal ini pasca tenggelamnya desa-desa mereka, namun sebelum menemukan bentuk kehidupan sosial-budaya yang stabil di tempat relokasi.

Pada masa ini, warga berada dalam ketidakpastian identitas mereka bukan lagi bagian dari desa yang tenggelam, tapi juga belum sepenuhnya menyatu dengan kondisi baru. Tradisi lama sulit dipraktikkan karena kehilangan tempat sakral, makam leluhur, sawah, hingga rumah yang menjadi tempat berjalannya adat. Namun dalam kerentanan ini, tumbuh kesadaran baru untuk menciptakan wadah yang dapat menjembatani masa lalu dan masa depan. Fase ini menjadi titik krisis paling mendalam dalam pengalaman masyarakat Jatigede. Setelah kampung mereka tenggelam, mereka masuk ke dalam situasi yang disebut Turner sebagai *liminal space* (ruang ambang), tanpa kepastian. Mereka belum sepenuhnya memiliki tempat baru, namun sudah tidak bisa kembali ke tempat lama. Muncul kekacauan batin dan kebingungan identitas; masyarakat tidak lagi bisa bertani, tetapi juga belum siap beralih ke pekerjaan baru. Beberapa hidup dalam

ketidakjelasan hukum, sosial, bahkan spiritual. Relokasi tidak merata, sebagian kehilangan pegangan hidup. Dalam fase ini masyarakat seperti "mengambang" tidak tahu harus ke mana, siapa mereka kini, dan bagaimana harus menjalani hidup. Salah satu informan, Pak Sihabudin, menyatakan bahwa "Kami seperti kehilangan napas... semua hilang, makam, sawah, rumah. Kita bingung harus ke mana" banyak masyarakat merasakan kekacauan ini setelah kampung ditenggelamkan.

4.3.3 *Incorporation*

Tahap terakhir dalam liminalitas adalah *incorporation*, yaitu saat masyarakat mulai menerima realitas baru dan membentuk struktur sosial-budaya yang baru pula. Bagi masyarakat Jatigede, meskipun mereka kehilangan tanah kelahiran, mereka tidak kehilangan jati diri. Maka lahirlah Ritual Larung yang pertama sebagai ruang untuk bangkit dan untuk merawat memori kolektif dan nilai-nilai leluhur. Ritual Larung pertama bukan hanya media mengenang kampung halaman, tetapi juga menjadi titik balik spiritual dan sosial. Mereka menanam harapan baru di atas luka lama. Setelahnya, ritual larung menjadi tradisi tahunan, tetapi esensi paling kuat terjadi pada yang pertama karena saat itulah masyarakat mulai memaknai kehilangan dengan cara baru, bukan sekadar berduka, tapi mulai berdamai dan percaya diri dengan identitas baru mereka. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Lembaga Adat, Bapak Sihabudin "Kita itu 'ngamumule' karuhun-karuhun yang ada di sekitar Bendungan Jatigede... agar anak cucu kita tahu sejarah awalnya, dampak, pengorbanan masyarakat..." Dengan kata lain, Ritual Larung menjadi simbol transisi dari keterputusan menuju penyatuan kembali, meskipun dalam wujud yang baru. Doa

bersama di makam relokasi, prosesi mengarak sesajen, hingga kegiatan spiritual di atas air merupakan bentuk perwujudan liminalitas yang sarat makna dan kesakralan.

Tradisi Larung Jatigede menjadi bentuk *incorporation* bukan hanya upacara simbolik, melainkan sarana konkret untuk mengikat kembali komunitas yang tercerai berai akibat pembangunan waduk. Melalui tradisi ini, masyarakat tidak lagi terjebak dalam kesedihan, melainkan memilih untuk mengenang dengan cara yang bermartabat. Prosesi ritual yang mencakup ziarah, tarian umbul, pelarungan sesajen, dan tabur benih ikan, menunjukkan bahwa masyarakat membangun ulang relasi dengan alam, leluhur, dan sesama. Bahkan, aspek ekonomi dan pariwisata pun mulai dimasukkan ke dalam ruang ritual ini melalui partisipasi UMKM, pelibatan pemerintah daerah, hingga wacana perlombaan perahu dan parade perahu hias. Pak Nanang, salah satu warga, mengatakan “...kita juga bisa meningkatkan peluang perekonomian setelah adanya bendungan ini... kita juga harus ‘ngamumule’ dengan cara ikut andil dalam tradisi Larung ini...”

Dengan demikian, *incorporation* di Jatigede bukan hanya penerimaan pasif, tetapi bentuk perlawanan kultural yang elegan. Mereka menghidupkan kembali kesadaran kolektif melalui ritual, bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk membentuk masa depan yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan sejarah mereka.

4.4 Liminalitas Sebagai Ruang Perubahan Sosial Budaya

Pembangunan Waduk Jatigede telah menciptakan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dari sisi fisik atau ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial, budaya, bahkan psikologis. Dalam konteks teori liminalitas yang

dikemukakan oleh Victor Turner, masyarakat yang mengalami dislokasi seperti ini tidak hanya berada dalam fase peralihan, tetapi juga memasuki ruang antara di mana struktur lama belum sepenuhnya hilang dan struktur baru belum sepenuhnya terbentuk. Ritual Larung yang diselenggarakan setiap tahun pasca penggenangan menjadi bukti nyata dari bagaimana masyarakat memaknai kembali ruang dan identitas mereka dalam situasi transisi tersebut.

a) Transformasi Budaya

Penggenangan Waduk Jatigede bukan hanya menenggelamkan ribuan hektar lahan subur, tetapi juga melenyapkan ruang budaya yang menjadi tempat berlangsungnya tradisi agraris dan spiritual masyarakat. Hilangnya kampung halaman berarti hilangnya pula situs-situs penting seperti makam leluhur, leuit (lumbung padi), tempat ziarah, hingga lokasi pelaksanaan upacara adat seperti nyawen, njuh bulanan, dan ngekahan.

Namun masyarakat tidak lantas kehilangan budaya mereka. Dalam situasi liminal ini, terjadi proses transformasi budaya. Nilai-nilai lama tetap dipertahankan, namun dikemas dalam bentuk dan konteks baru. Misalnya, tradisi pertanian yang dulu dilaksanakan di sawah kini disimbolkan lewat prosesi pelarungan sesajen dan penebaran benih ikan ke waduk. Ritual Larung pun menjadi media untuk mengekspresikan kembali penghormatan pada leluhur melalui ziarah ke makam yang telah direlokasi ke bukit. Keadaan flora di sekitar ini sangat subur baik untuk ditanami padi, bakau, pohon jati, dan pepohonan produktif lainnya Daerah yang subur, hijau, dan ditumbuhi berbagai tanaman produktif akhirnya harus hilang karena digenangi air (Makmur dkk., hlm. 178-180:2014). Namun, masyarakat

membuktikan bahwa hilangnya ruang fisik tidak serta-merta memusnahkan nilai budaya. Mereka mentransformasikannya ke dalam bentuk ritual. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bersifat adaptif, tidak statis. Tradisi tidak punah, tetapi bermutasi mengikuti konteks.

b) Penguatan Solidaritas

Salah satu ciri utama dari fase liminal menurut Victor Turner adalah munculnya komunitas yaitu solidaritas yang terbentuk dari pengalaman kolektif yang liminal. Dalam konteks Jatigede, pengalaman relokasi dan kehilangan tanah leluhur menjadi pengalaman bersama yang menyatukan masyarakat secara emosional dan spiritual.

Ritual Larung berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial ini. Dalam proses pelaksanaannya, warga dari berbagai latar belakang turut terlibat yang menyumbang ikan hingga satu kuintal, beras puluhan kilogram, bahkan tenaga dan waktu untuk menyiapkan ritual. Kebersamaan dalam mempersiapkan acara, berkumpul kembali di tempat yang memiliki nilai historis bersama, hingga berziarah ke makam leluhur, menciptakan momen emosional yang merekatkan hubungan antarwarga. Dalam acara Larung, salah satu tokoh masyarakat menyebut: “Ritual Larung téh sakalian tempat silaturahmi, anu geus nyebar ka mana-mana bisa papanggih deui di dieu.” Ini menunjukkan bahwa dalam ruang liminal, di tengah kehilangan dan ketidakpastian, masyarakat justru menemukan kembali rasa kebersamaan yang mendalam. Kehilangan kampung bukan berarti kehilangan rasa komunitas.

c) Lahirnya Ruang Sosial Baru

Liminalitas tidak hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang penciptaan. Setelah

penggenangan, masyarakat Jatigede tidak lagi hidup di ruang yang sama, baik secara geografis maupun sosial. Mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, pekerjaan baru, hingga sistem sosial yang berbeda.

Sebagian warga beralih dari petani ke nelayan. Ada pula yang mencoba peruntungan di sektor informal atau usaha kecil. Namun proses ini tidak berjalan mulus. Pemerintah belum sepenuhnya menyediakan pelatihan atau fasilitas adaptasi sosial yang memadai. Banyak masyarakat mengalami kebingungan dan tekanan sosial akibat perubahan yang cepat dan tidak terencana. Belum dipersiapkan perubahan sosial dari masyarakat petani menjadi masyarakat perikanan, secara psikologis harus dipersiapkan agar masyarakat tidak stress terhadap perubahan tersebut (Makmur dkk., hlm. 182-183:2014). Di tengah tantangan tersebut, ritual Larung menjadi ruang sosial baru. Ia bukan hanya ritual sakral, tetapi juga forum kebudayaan, diskusi, ekspresi seni, hingga pasar temporer. Hadirnya talkshow dengan akademisi dan budayawan menunjukkan bahwa ruang ritual ini berkembang menjadi arena pertukaran gagasan dan identitas kolektif.